

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan visi Pembangunan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Demi terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta beradab berdasarkan asas Pancasila, maka pemerintah menerapkan Pendidikan karakter sebagai suatu landasan.

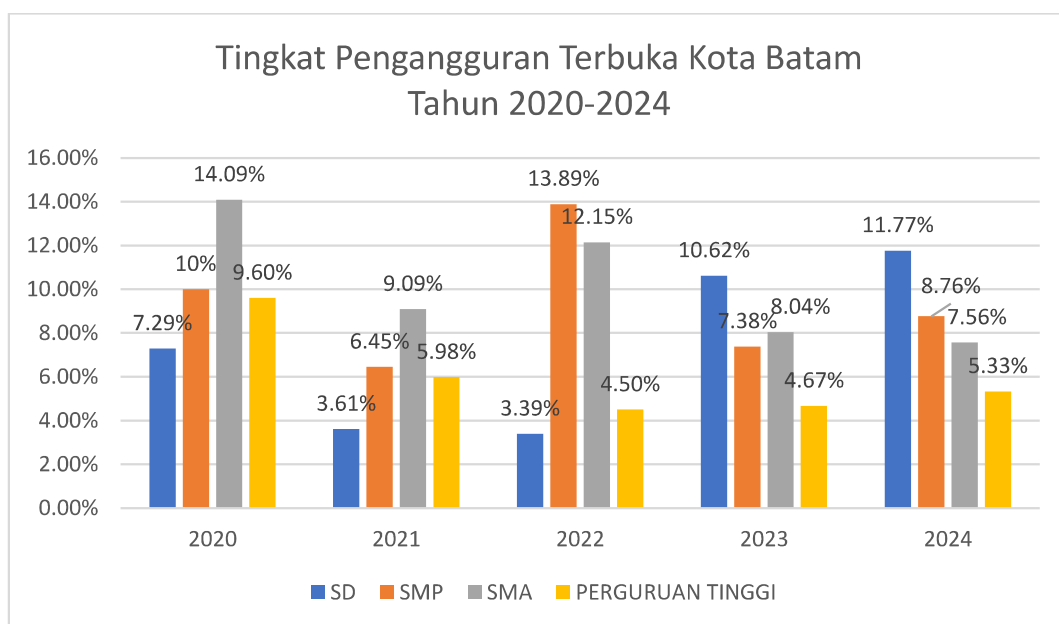
Perguruan tinggi sangat penting dalam membantu mengembangkan individu yang bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Perguruan tinggi di Indonesia diharapkan memiliki pengaruh besar dan mempersiapkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pasar kerja. Dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta semakin banyaknya lulusan yang memasuki dunia kerja, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pun meningkat. Perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pendidikan terbaik yang menginspirasi para pencari kerja untuk menjadi pencipta lapangan kerja atau wirausahawan (Retnowati & Putra, 2021).

Sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan substansial cukup banyak dinegara ini, tetapi tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan daripada penurunan. Khususnya, kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi justru terdiri dari individu terdidik. Penting bagi siswa untuk mengenali masalah ini

dan memikirkan solusi untuk mengurangi pengangguran di negara ini, khususnya di Kota Batam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat pada tahun 2020 di kalangan penduduk berpendidikan SMA dengan persentase mencapai 14,09 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada tahun 2022 di kalangan penduduk berpendidikan SD, yaitu hanya sebesar 3,39 persen. Data tersebut dapat dilampirkan melalui data berikut:

Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan pada Agustus 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan **Gambar 1.1** tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam telah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran tertinggi dicatat oleh lulusan Sekolah Menengah Atas atau SMA sebesar 14,09%, disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama atau SMP sebesar

10%, perguruan tinggi sebesar 9,60%, dan yang paling rendah adalah lulusan Sekolah Dasar atau SD sebesar 7,29%. Data ini menunjukkan bahwa lulusan SMA paling rentan terhadap pengangguran di awal masa pandemi, meskipun mereka berada pada level pendidikan menengah yang seharusnya cukup untuk masuk ke dunia kerja.

Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan di semua jenjang pendidikan. Tingkat pengangguran lulusan SD turun menjadi 3,61%, SMP menjadi 6,45%, SMA menjadi 9,09%, dan perguruan tinggi menjadi 5,98%. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh mulai pulihnya sektor usaha dan industri di Kota Batam pasca pelonggaran kebijakan pandemi. Meskipun begitu, lulusan SMA masih menempati posisi tertinggi dalam tingkat pengangguran, menandakan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan menengah atas.

Tahun 2022 mencatat lonjakan drastis pada tingkat pengangguran lulusan SMP dan SMA. Lulusan SMP mencapai 13,89% dan SMA sebesar 12,15%, menjadikannya sebagai dua kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi justru turun menjadi 4,50%, dan lulusan SD menjadi yang terendah dengan angka 3,39%. Kenaikan signifikan pada lulusan SMP dan SMA bisa disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan untuk lulusan dengan keterampilan menengah, serta meningkatnya persaingan tenaga kerja.

Pada tahun 2023, lulusan SD justru mengalami lonjakan tingkat pengangguran menjadi 10,62%, mengungguli jenjang lainnya. Sementara itu,

lulusan SMP berada di angka 7,38%, SMA 8,04%, dan perguruan tinggi tetap relatif rendah yaitu 4,67%. Fenomena ini mencerminkan bahwa tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah menjadi kelompok paling terdampak ketika pasar kerja membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan lebih spesifik.

Tahun 2024 menunjukkan pola yang relatif serupa, di mana lulusan SD kembali mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 11,77%. Lulusan SMP mengalami peningkatan menjadi 8,76%, SMA menurun ke angka 7,56%, dan perguruan tinggi mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,33%. Data ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung berkorelasi dengan semakin rendahnya tingkat pengangguran, meskipun tidak secara mutlak. Dapat disimpulkan dari grafik tersebut, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi lulusan SD dan SMP, agar dapat bersaing di dunia kerja.

Mendorong masyarakat untuk memulai usaha sendiri, yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa lain yang menganggur, merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran. Menurut (Olivia et al., 2021) generasi z lahir antara tahun 1997 sampai 2012, generasi dibesarkan dalam masyarakat yang teknologi dan pengetahuannya berkembang pesat, dikenal sebagai digital natives, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan internet, media sosial, dan perangkat teknologi canggih serta memberikan mereka keunggulan dalam mengakses informasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Generasi z memiliki peluang besar untuk terlibat dalam dunia wirausaha dan memiliki akses luas terhadap informasi dan teknologi tetapi partisipasi aktif dalam kegiatan

wirausaha masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi perilaku berwirausaha di kalangan generasi Z (Jaya et al., 2025). Berikut jumlah wirausaha yang ada di Indonesia dari tahun 2020 - 2024:

Tabel 1. 1 Jumlah Wirausaha di Indonesia (2020–2024)

Tahun	Wirausaha Pemula (juta)	Wirausaha Mapan (juta)	Total Wirausaha (juta)
2020	47,21	4,90	52,11
2021	47,25	4,39	51,64
2022	49,18	4,48	53,66
2023	51,01	4,90	55,91
2024	51,55	5,01	56,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2025

Berdasarkan data selama lima tahun terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2025), jumlah wirausaha di negara Indonesia mengalami peningkatan signifikan selama periode lima tahun terakhir. Terdapat dua kategori utama yang dicatat dalam tabel, yaitu wirausaha pemula dan wirausaha mapan. Total wirausaha merupakan akumulasi dari kedua kategori tersebut. Pada tahun 2020, jumlah wirausaha pemula tercatat sebanyak 47,21 juta orang, sedangkan wirausaha mapan mencapai 4,90 juta orang. Secara keseluruhan, total wirausaha di Indonesia pada tahun ini adalah 52,11 juta orang. Data ini menandakan bahwa sebagian besar wirausaha masih berada pada tahap awal atau pemula dalam menjalankan usahanya. Tahun berikutnya, yakni 2021, jumlah wirausaha pemula meningkat menjadi 47,25 juta orang, dan wirausaha mapan juga bertambah menjadi 4,39 juta orang. Dengan demikian, total wirausaha mencapai 51,64 juta orang. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap

kewirausahaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah wirausaha pemula kembali meningkat menjadi 49,18 juta orang, sementara wirausaha mapan mencapai 4,48 juta orang. Total jumlah wirausaha Indonesia pada tahun ini mencapai 53,66 juta orang. Pertumbuhan yang konsisten ini memperlihatkan bahwa program dukungan terhadap UMKM dan wirausaha mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi, dengan wirausaha pemula meningkat drastis menjadi 51,01 juta orang, dan wirausaha mapan naik menjadi 4,90 juta orang. Dengan demikian, total wirausaha pada tahun tersebut tercatat sebanyak 55,91 juta orang. Peningkatan tinggi ini dapat dikaitkan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap wirausaha muda dan generasi digital (seperti Gen Z) yang mulai banyak membuka usaha berbasis teknologi. Data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan jumlah wirausaha pemula sebesar 51,55 juta orang dan wirausaha mapan sebanyak 5,01 juta orang, sehingga total wirausaha mencapai 56,56 juta orang. Angka ini mencerminkan hasil dari beragam kebijakan dan program pembinaan kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap keuangan dan platform digital. Kenaikan ini mayoritas didorong oleh pertumbuhan signifikan pada kategori wirausaha pemula. Data ini menegaskan bahwa Indonesia sedang mengalami perkembangan positif dalam hal ekosistem kewirausahaan, dan potensi Gen Z sebagai pelaku utama wirausaha di masa depan sangat besar. Selanjutnya, aspek yang tidak kalah penting dalam mendorong aktivitas wirausaha dan menjadi faktor penentu wirausaha adalah kebijakan pajak.

Kebijakan pajak terdiri dari serangkaian aturan dan strategi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola pemungutan pajak, yang membantu mendanai operasional negara dan membentuk tindakan ekonomi individu dan perusahaan. Penerapan pajak yang adil dan terbuka mampu meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas usaha, sehingga pelaku wirausaha merasa lebih aman dalam merancang strategi bisnis jangka panjang. Sebaliknya, ketidakjelasan atau kompleksitas sistem perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan kegiatan ekonominya (Dian Efriyenti, 2025).

Kebijakan Pajak yang mendukung bisnis biasanya berupa insentif, penurunan tarif, atau prosedur perpajakan yang lebih mudah. Keberhasilan kebijakan pajak ini sangat bergantung pada bagaimana para pengusaha bereaksi terhadap peraturan perpajakan (Mu'arif & Lestari, 2023). Kebijakan ini memengaruhi operasional sehari-hari dan pilihan strategis yang lebih luas, serta memengaruhi tingkat perkembangan kewirausahaan. Perancangan kebijakan semacam itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi dunia saat ini (Hura & Molinda Kakisina, 2022).

Terdapat beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh terhadap perilaku berwirausaha. Para peneliti tersebut diantaranya (Dian Efriyenti, 2025) dan (Asmoro et al., 2022) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku berwirausaha. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Aji & Ausah, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha. Kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah tidak hanya memengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berdampak pada kapasitas keuangan pelaku usaha. Kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak hanya menentukan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memengaruhi kemampuan finansial pelaku usaha. Perusahaan memerlukan berbagai sumber daya untuk merancang inovatif, serta menempatkannya secara strategis di pasar. Dalam hal ini, keuangan dipandang sebagai jenis sumber daya yang memiliki kegunaan luas dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi.

Akses keuangan adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk menerima layanan keuangan resmi seperti rekening tabungan, pinjaman, asuransi, dan opsi pembayaran dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebuah bisnis dapat menemukan cara untuk mendapatkan uang, tetapi hal ini seringkali disertai dengan biaya atau tanggung jawab. Bagi wirausahawan, memiliki akses keuangan sangat penting karena menentukan berapa banyak modal kerja yang dapat mereka peroleh untuk mengembangkan bisnis (Rizki Agung Putra et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akses keuangan berpengaruh terhadap perilaku berwirausaha. Para peneliti tersebut diantaranya (Rizki Agung Putra et al., 2021) dan (Sultan et al., 2025) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akses keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku berwirausaha. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Efriyenti (2025) yang menjelaskan bahwa akses keuangan

tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha. Akses keuangan memberikan peluang bagi individu untuk menjalankan usaha, yang dapat membentuk niat mereka menjadi wirausahawan.

Niat berwirausaha diartikan sebagai motivasi atau keinginan batin yang dirasakan seseorang untuk memulai dan menjalankan bisnis. Berdasarkan temuan penelitian oleh (Dian Efriyenti, 2025), niat ini dianggap sebagai elemen penting dalam pembentukan wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Niat untuk berwirausaha terbentuk melalui berbagai faktor, antara lain pengaruh lingkungan, sikap individu terhadap kewirausahaan, serta persepsi mengenai kemudahan akses dan dukungan yang tersedia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa niat berwirausaha tidak semata-mata berasal dari minat personal, melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup, peran keluarga, serta pemahaman tentang kewirausahaan yang diperoleh melalui proses pendidikan dan interaksi sosial.

Niat mencerminkan sejauh mana keberanian seseorang untuk mengambil langkah untuk menunjukkan adanya rencana yang ingin diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam konteks kewirausahaan, niat berwirausaha merupakan proses individu dalam mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam menjalankan usaha. Niat ini juga menggambarkan suatu dorongan internal dan kesiapan seseorang untuk mengambil kendali atas pekerjaannya sendiri, dengan memilih mendirikan usaha secara mandiri daripada bekerja di bawah arahan pihak lain (Violin V, 2021).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa niat memengaruhi perilaku berwirausaha. Menurut (Erawati & Wati, 2021) dan (Asmoro et al., 2022) niat berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Semakin kuat keinginan seorang mahasiswa untuk menjadi wirausaha, semakin tinggi pula niatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan terbentuk dari perpaduan antara faktor internal seperti pola pikir, dorongan pribadi, dan sifat individu, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, institut pendidikan, dan lembaga keuangan sangat di perlukan dalam pengembangan perilaku wirausaha. Kebijakan yang memberikan dukungan, kemudahan akses pendanaan, dan ketersediaan pelatihan merupakan elemen penting untuk mendorong pola pikir kewirausahaan, terutama di kalangan muda, agar mereka tidak hanya memiliki niat tetapi juga mampu merealisasikan ide bisnis yang direncanakan (Asmoro et al., 2022).

Kebijakan pajak yang sederhana, adil, dan mendukung pertumbuhan usaha mendorong pelaku usaha untuk lebih berani memulai dan mengembangkan kegiatan bisnisnya. Dalam hal lain, kemudahan akses terhadap layanan keuangan, seperti ketersediaan pinjaman usaha dan inklusi keuangan, memberikan keyakinan bagi individu untuk merealisasikan rencana wirausaha mereka. Niat berwirausaha menjadi faktor internal yang paling kuat dalam mendorong seseorang untuk bertindak, namun niat tersebut perlu diperkuat oleh faktor eksternal yang kondusif agar dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Secara sederhana seseorang memiliki motivasi dan keinginan tinggi untuk berwirausaha, tanpa dukungan dari kebijakan yang tepat dan akses pembiayaan yang memadai, niat tersebut akan sulit berkembang menjadi perilaku wirausaha yang produktif. Bersumber dari pembahasan latar belakang yang telah dibahas diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji **‘PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, AKSES KEUANGAN DAN NIAT TERHADAP PERILAKU BERWIRAUSAHA MAHASISWA GENERASI Z DI KOTA BATAM’**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Generasi Z, meskipun memiliki akses teknologi dan informasi, belum menunjukkan partisipasi optimal dalam kegiatan kewirausahaan.
2. Kebijakan pajak dinilai kompleks dan belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa, sehingga menjadi hambatan untuk memulai usaha.
3. Akses terhadap layanan keuangan masih terbatas dan menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh modal usaha.
4. Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan perbedaan pengaruh antara kebijakan pajak, akses keuangan, dan niat terhadap perilaku berwirausaha.

1.3 Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah yang peneliti batasi dalam peneletian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipan yang dipilih untuk penelitian ini adalah mahasiswa Gen Z di Kota Batam.
2. Variabel independent yang termasuk dalam penelitian ini ialah Kebijakan Perpajakan, Akses Keuangan, dan Niat.
3. Variabel dependen yang termasuk dalam penelitian ini ialah Perilaku Berwirausaha (Y)
4. Lokasi penelitian ini adalah Di Universitas Batam tepatnya di Kawasan Batam Center.
5. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dengan disebarkan kepada Mahasiswa di Kota Batam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam?
2. Apakah akses keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam?
3. Apakah niat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam?
4. Apakah kebijakan pajak, akses keuangan, dan niat berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Perilaku Berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam.
2. Untuk menguji Pengaruh Akses Keuangan terhadap Perilaku Berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam.
3. Untuk menguji Pengaruh Niat berwirausaha terhadap Perilaku Berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam.
4. Untuk menguji Pengaruh Kebijakan Pajak, Akses Keuangan, dan Niat berwirausaha secara bersama-sama terhadap Perilaku Berwirausaha mahasiswa Generasi Z di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teoritis mengenai perilaku kewirausahaan, khususnya dengan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Teori Atribusi. TPB mengemukakan bahwa keinginan individu untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dari lingkungan sosial, serta persepsi terhadap kemampuan dalam mengendalikan tindakan tersebut. Ketiga elemen ini sangat relevan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan seseorang untuk memulai atau menjalankan usaha.

Sementara itu, Teori Atribusi berfokus pada bagaimana seseorang menilai atau menafsirkan penyebab dari suatu peristiwa, termasuk keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan usaha. Teori ini digunakan untuk memahami

bagaimana pelaku usaha memberikan makna terhadap kebijakan pemerintah dan keterbatasan akses keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi respons serta keputusan bisnis serta menambah wawasan terkait pengaruh faktor kebijakan, akses keuangan, dan niat terhadap kewirausahaan.

1.6.2 Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bermanfaat bagi:

1. Untuk peneliti sendiri

Untuk memahami pentingnya perencanaan dan kesiapan dalam berwirausaha.

2. Untuk perguruan tinggi/mahasiswa

Dapat meningkatkan program pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan menjadi tolak ukur yang baik dalam menjalankan wirausaha

3. Pemerintah dan lembaga keuangan

Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pajak dan akses pembiayaan yang ramah bagi calon wirausahawan muda.

4. Untuk Masyarakat

Dapat membangun pola pikir kewirausahaan yang baik dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlaku.